

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori merupakan seperangkat konsep yang tersusun secara sistematis serta memuat berbagai variabel dalam suatu penelitian, oleh karenanya landasan teori menjadi fondasi penting dalam suatu penelitian yang dilakukan. Landasan teori memuat berbagai teori dan juga hasil penelitian yang berisikan studi kepustakaan yang relevan serta dapat menopang pokok permasalahan yang ingin diteliti, sehingga dapat menjadi pedoman dalam berbagai masalah yang muncul dalam suatu penelitian. Landasan teori seringkali juga dipahami sebagai kerangka teori. Menurut Sugiyono (2013), landasan teori juga dapat dipahami sebagai alur logika atau penalaran yang berisikan seperangkat definisi, konsep, serta proporsi yang disusun secara sistematis. Sehingga, penciptaan landasan teori yang baik merupakan sebuah urgensi dalam suatu penelitian, karena landasan penelitian merupakan refleksi daripada penelitian itu sendiri.

Secara umum, kerangka landasan teori terdiri dari beberapa konsep beserta dengan definisi dan juga referensi yang akan digunakan untuk literatur ilmiah yang sangat relevan, teori yang digunakan untuk studi atau penelitian. Kerangka teoritis harus menunjukkan pemahaman tentang teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian dan berhubungan dengan bidang pengetahuan yang lebih luas yang sedang dipertimbangkan.

2.1.1 Pertahanan Negara

Sebagai sebuah disiplin ilmu, ilmu pertahanan mengkaji mengenai keseluruhan aspek yang berkaitan dengan keamanan dalam skala nasional dan melekat pada tujuan penyelenggaraan negara. Ilmu pertahanan harus mampu mencegah ancaman yang saat ini selalu berkembang akibat dinamika lingkungan strategis. Perkembangan kondisi nasional, regional dan internasional sangat mempengaruhi proses pencapaian tujuan nasional.

Ancaman terhadap negara menjadi perhatian yang penting untuk segera ditemukan solusi pencegahannya. Kementerian Pertahanan telah merumuskan beberapa faktor yang dikategorikan sebagai ancaman melalui kajian terus-menerus. Perkembangan lingkungan strategis seperti dinamika keamanan di Indo-Pasifik, isu perbatasan, konflik intra dan antar-negara, konflik kontemporer, isu senjata pemusnah masal, terorisme, dan kejahatan lintas negara menjadi bagian dari kajian ilmu pertahanan.

Secara umum, pertahanan merupakan reaksi dari suatu badan terhadap sebuah agresi, dan melewati ekstensi segala cara dan langkah-langkah, identifikasi dan pengukuran risiko atau bahaya, demikian pula dengan perlindungan dan/atau tanggapan. Hakikat dari pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan yang bersifat semesta dimana penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara.

Dalam buku putih Pertahanan Negara (2015), dijelaskan bawah Pertahanan Negara merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, dengan mengikut sertakan seluruh warga negara dalam usaha pertahanan negara. Pertahanan negara merupakan kekuatan bersama antara sipil dan militer untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya dari ancaman-ancaman. Pertahanan nasional dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa, "Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara". Sebagai upaya dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah dalam membangun pertahanan negara, maka terdapat perumusan strategi pertahanan negara yang di dalamnya terkandung tujuan, sasaran strategis, serta cara mencapai sasaran dan juga sumber daya pertahanan yang akan berimplikasi terhadap pencapaian

kemampuan pertahanan negara yang tangguh, efektif, serta berdaya tangkal tinggi. Sementara itu, di dalam pasal 1 ayat (2), UU No. 3 Tahun 2002, tentang pertahanan negara dinyatakan bahwa:

“Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman” (UU No. 3 Tahun 2002).

Menurut Smith (1919), dalam perkembangannya, Pertahanan Negara merupakan refleksi dari perkembangan hubungan antara Athena dan Sparta yang mengarah kepada *Peloponnesian War*. Hal ini kemudian mengarahkan pada pengembangan konsep peperangan oleh *Thucydides* yang dimulai dari kombatan aliansi yang kemudian tercermin dalam hubungan kekuasaan dengan perilaku individu saat terjadinya konflik. Konsep ini berkembang hingga pada masa perang dingin antara Soviet dan AS, yang kemudian melahirkan derivasi antara keadaan perang dan damai. Selanjutnya, mulai era inilah banyak negara besar yang mulai mengembangkan sektor pertahanan yang menjadi fokus utama dalam konteks kenegaraan (Lee, Feinbaum, & Ambros, 2004). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pertahanan negara merupakan produk yang lahir dari pokok pikiran kaum realis. Selanjutnya, dalam upaya mengembangkan pertahanan negara, banyak negara besar yang kemudian mulai menata perkembangan konsep pertahanan negara yang dimulai dengan pembentukan instrumen pertahanan negara melalui pembangunan institusi pertahanan serta tatanan operasi yang kemudian melahirkan strategi. Sehingga sebagai sebuah negara kepulauan terbesar, maka dibutuhkan upaya kerja sama dan dialog diplomatik dalam upaya Penguatan Peran Diplomasi AL di Kawasan Indo-Pasifik, sehingga dapat dibangun sistem pertahanan negara yang baik dalam rangka mencapai tujuan nasional terutama di bidang pertahanan.

2.1.2 Teori Strategi

Secara umum, strategi dapat dipahami sebagai upaya, skema, serta langkah yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Carl Von Clausewitz, yang merupakan seorang master di bidang strategi, dalam bukunya *On War* menyatakan jika strategi merupakan penggunaan *engagement for the purpose of war*. Strategi berfokus kepada penggunaan kekuatan dalam melakukan upaya *engagement* untuk mencapai tujuan (Clausewitz, 2007, p. 133). Teori strategi menjelaskan mengenai penentuan tujuan terhadap keseluruhan elemen yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, menurut buku Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2007, Strategi merupakan: (1) ilmu dan seni dalam upaya penggunaan keseluruhan sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam masa perang maupun damai; (2) Ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, untuk mendapatkan kondisi yang menguntungkan; (3) Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus; (4) tempat yang baik menurut siasat perang.

Definisi strategi lainnya juga disampaikan oleh B.H Liddell Hart's yang menyatakan bahwa strategi adalah "*the art of distributing and applying military means to fulfill the ends of policy*" atau seni dalam penggunaan dan pendistribusian (*ways*) sarana militer (*means*) dalam rangka mewujudkan tujuan akhir kebijakan (*ends*). Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi merupakan ilmu dan seni dalam menentukan tujuan (*ends*), dengan merumuskan cara-cara yang ditempuh (*ways*) serta menentukan sarana prasarana (*means*) yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan (*ends*).

Jika merujuk kepada model Strategi dari Arthur F. Lykke (1997), terdapat 3 elemen penting dalam membangun Strategi Pertahanan Negara yaitu *Ends*, *Means*, dan *Ways*. Ketiga elemen ini akan dielaborasi melalui poin-poin di bawah ini:

- a) *Ends*, yaitu menjelaskan Apa yang ingin dicapai. *Ends* merupakan buah dari berbagai pertimbangan kepentingan serta faktor-faktor dalam lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi terwujudnya cita-cita

nasional (Jika dikaitkan dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu termuat dalam pembukaan UUD 1945 pada Alinea keempat). *Ends* juga dibatasi oleh berbagai aspek yang mencakup petunjuk kebijakan, strategi yang tingkatannya lebih tinggi, dinamika lingkungan strategis, kemampuan dan keterbatasan instrumen, serta kekuasaan negara dan sumber daya yang tersedia.

- b) *Means*, yang mencakup sarana dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mencapai strategi yang telah ditetapkan. Sarana dan sumber daya yang dimiliki inilah yang kemudian menjadi penetapan batasan terhadap jenis dan taktik dukungan modal yang tersedia untuk mewujudkan konsep strategi. Adapun sumber daya yang dimaksudkan di sini dapat berwujud nyata (Angkatan bersenjata, Uang dan Fasilitas, Masyarakat, dan Peralatan yang ada), maupun tidak nyata (Keinginan, Semangat, Keberanian, dan Kecerdasan).
- c) *Ways*, merupakan cara atau dapat dipahami sebagai konsep strategik yang mencakup bagaimana cara mencapai suatu tujuan dengan menggunakan berbagai instrumen dengan maksimal. Cara-cara inilah yang kemudian akan menghubungkan sumber daya yang ada ke tujuan dengan menyatakan siapa yang akan mengerjakan apa, di mana, kapan dan bagaimana serta mengapa, sebagai jawaban yang akan didapatkan untuk menjelaskan “Bagaimana” suatu tujuan dapat tercapai. Dalam konsep strategik ini (*ways*), sangatlah penting untuk memberikan kejelasan petunjuk dari sebuah perencanaan kepada orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan memberdayakannya, sehingga tujuan tersebut tidak salah sasaran strategisnya (Lykke, 1989).

Dalam penelitian ini, untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai penguatan peran TNI AL di Kawasan Indo-Pasifik maka dibutuhkan strategi yang tepat untuk dapat mendukung Sistem Pertahanan Negara Indonesia. Strategi tersebut dirumuskan dalam tiga substansi dasar strategi pertahanan, yang meliputi “tujuan apa yang ingin dicapai” (*ends*), “sarana dan prasarana apa yang dapat digunakan” (*means*), serta “bagaimana cara mencapai

tujuan yang diinginkan” (*ways*). Sebagai contohnya dapat dipahami bahwa Proses strategis adalah tentang bagaimana (*konsep atau cara*) kepemimpinan akan menggunakan kekuatan (*sumber daya atau sarana*) yang tersedia bagi negara untuk melakukan kontrol atas serangkaian keadaan dan lokasi geografis untuk mencapai tujuan (*tujuan*) sesuai dengan kebijakan negara. Dalam koridor penelitian ini, *Ends* adalah mencapai sistem pertahanan negara dengan memaksimalkan peran diplomasi AL di kawasan Indo-Pasifik dalam rangka menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, keselamatan segenap bangsa. *Means* adalah sumber daya nasional di bidang kelautan yang digunakan untuk mempertahankan dan mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sedangkan *ways* adalah bagaimana menggunakan sumber daya nasional untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dipertahankan, yakni dengan merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan suatu sistem pertahanan negara yang tangguh dan berdaya tangkal tinggi sesuai dengan paham bangsa Indonesia tentang damai dan perang (Kementerian Pertahanan RI, 2015).

Strategi pertahanan menempatkan kebijakan pertahanan sebagai ujung dari strategi nasional yang ditetapkan oleh suatu negara. Strategi pertahanan dapat dirinci lagi dalam beberapa bentuk seperti strategi militer umum, strategi diplomasi pertahanan, dan strategi manajemen dan perencanaan pertahanan. Indonesia menggambarkan strategi pertahanan sebagai integrasi pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter dalam menghadapi berbagai dimensi ancaman dengan tujuan akhir mengamankan kepentingan nasional (Kementerian Pertahanan RI, 2015). Strategi harus menggambarkan bagaimana dan mengapa tindakan yang diusulkan akan menyebabkan pencapaian suatu tujuan. Proses pembuatan strategi harus didorong oleh evaluasi teori-teori kesuksesan saingan (Meiser, 2017).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori strategi menurut Lykke untuk memberikan analisis komprehensif mengenai *ends, means, dan ways* atau tujuan, sarana serta cara yang dilakukan oleh TNI AL serta institusi dalam domain kelautan lainnya, sehingga didapatkan strategi yang dapat memperkuat peran

TNI AL di Kawasan Indo-Pasifik dalam Mendukung Sistem Pertahanan Negara Indonesia.

2.1.3 *Sea Power*

Beberapa pemikir maritim Barat seperti Alfred Thayer Mahan, 1890 (*The Influence of Sea Power upon History*), Julian Corbett, 1911 (*Some Principles of Maritime Strategy*), sampai pada Sam Tangredi, 2004 (*Globalization and Maritime Power*) dan Geoffrey Till, 2018 (*Sea Power: A Guide for the Twenty Century*), mengangkat arti pentingnya aspek laut dan kekuatan maritim bagi kesejahteraan bangsa. Mereka mengatakan bahwa kepentingan tersebut bisa terwujud bila memiliki elemen-elemen yang dibutuhkan untuk membangun negara maritim.

Umumnya dapat dibagi dalam dua aspek, yaitu strategis dan operasional. Elemen dalam aspek strategis adalah; (a) karakter geografi, dekat dengan laut, memiliki pantai yang relatif cukup panjang, (b) karakter bangsa yang menganggap laut sebagai aset penting untuk meningkatkan kesejahteraan nasional, (c) ada sumber kekayaan alam yang mendukung untuk membangun kekuatan maritim, dan (d) karakter pemerintah yang memiliki *mindset* berorientasi ke domain maritim. Sedangkan aspek operasional, lazimnya terdiri dari tiga elemen besar yaitu; (a) kekuatan pengamanan atau dalam istilah teknis *fighting instrument* untuk melindungi aset dan kepentingan, (b) armada niaga, termasuk armada perikanan dan pelayaran rakyat, yang mampu mendukung mobilisasi ekonomi nasional, dan (c) industri dan jasa yang mampu mendukung kedua elemen operasional, meliputi berbagai kegiatan yang terkait dengan laut (Marsetio., 2014).

Penggunaan terminologi *sea power* untuk pertama kalinya diperkenalkan Laksamana Muda Alfred Thayer Mahan (1840-1914), dalam bukunya *The Influence of Sea Power upon History: 1660-1783*. Mahan menjelaskan bahwa diperlukan enam elemen pokok yang akan menjadi modal utama dalam membangun sebuah negara yang memiliki kekuatan laut yang besar, yaitu: letak geografi (*geographical position*); bangun muka bumi (*physical*

conformation), luas dan panjang wilayah (*extent of territory*), karakter penduduk (*character of the people*), jumlah penduduk (*number of population*) dan karakter pemerintah (*character of government*). Elemen-elemen ini bersifat universal dan tanpa batas waktu (*universal and timeless in character*). Posisi geografis disebut sebagai kondisi yang paling signifikan. Contohnya adalah saat kebangkitan kekuatan laut Inggris (*British Sea Power*) di masanya. Secara ideal Inggris terletak di persimpangan jalur perdagangan Eropa. Inggris mampu memanfaatkan dan mengamankan jalur perdagangannya dari penggunaan laut oleh pihak lawan.

Menurut Geoffrey Till (2018), "*sea power is at the heart of the globalization process in a way which land and air power are not*". Dengan demikian, peran kekuatan laut Indonesia (*Indonesian Sea Power*) dalam globalisasi saat ini dan ke depan akan terus memainkan peran sentral. Oleh karena itu, keberadaan kekuatan laut Indonesia sebagai *means* untuk mengamankan kepentingan nasional yang terkait dengan domain maritim merupakan syarat yang tidak bisa ditawar (Marsetio., 2014, p. 91).

Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus untuk menjelaskan elemen pertama dalam perspektif *Sea Power* Mahan, yaitu posisi geografis Indonesia. Posisi geografis Indonesia yang strategis dan fakta Indonesia yang merupakan negara kepulauan, akan berimplikasi terhadap ancaman keamanan, kebijakan pertahanan serta kemampuan kekuatan maritim yang harus dimiliki oleh Indonesia.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 17.499 pulau dan memiliki wilayah laut sebesar 5,8 juta km², dengan kata lain sebanyak 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan. Sehingga merujuk pada fakta tersebut, maka Indonesia menjadikan sektor maritim sebagai prioritas dalam upaya membangun dan mencapai kepentingan nasionalnya. Posisi Indonesia juga merupakan titik persilangan antara benua Asia dan Australia, samudera Pasifik dan samudera Hindia, bahkan di kawasan ASEAN dua per tiga wilayahnya merupakan perairan Indonesia. Dengan posisi demikian, maka kepentingan ekonomi barat dan timur akan menggunakan perairan Indonesia. Sudah

sepantasnya Indonesia dapat memetik keuntungan sebesar-besarnya sebagai *main controller for main maritime traffic*.

Kondisi geografi berkaitan dengan maritim yang menjadikan negara Indonesia memiliki kepentingan vital yang harus dilindunginya demi kelangsungan hidup. Akses ke laut tersedia di semua pulau sehingga fasilitas pelabuhan merupakan urat nadi *connectivity*. Pelabuhan tidak saja sebagai simpul perdagangan laut tetapi juga pangkalan-pangkalan bagi pencarian dan pengembangan sumber energi baru dan sumber pangan baru. Pelabuhan di masa mendatang dapat dibangun di lepas pantai atau di tengah lautan dengan konsep *sea basing* sesuai konfigurasi kepulauan. *Physical conformation* merupakan posisi geografis yang memungkinkan untuk membangun medan pertahanan yang didukung oleh pembangunan pelabuhan dan pangkalan-pangkalan. Pelabuhan-pelabuhan yang baik merupakan keuntungan berlipat ganda untuk membuka semua sumberdaya yang dimiliki di semua daerah di Indonesia sehingga pembangunan pelabuhan mutlak menjadi prioritas pertama. Secara geopolitik, geoekonomi dan geostrategi, penetapan prioritas tersebut sesuai dengan model *Cost and Benefit Ratio Analysis* yang menunjukkan bahwa pembangunan pelabuhan laut di atas kebutuhan pembangunan bandar udara dan pembangunan jembatan antar pulau (Marsetio., 2014).



Gambar 2.1 Letak Geografis Indonesia
Sumber: Buku *Sea Power Indonesia* (2014)

2.1.4 Diplomasi Pertahanan Maritim (DPM)

Secara teoritis, DPM dapat dipahami sebagai perpaduan dari dua konsep penting yang berasal dari pendekatan Hubungan Internasional serta diskursus kebijakan strategis pasca terjadinya perang dingin (*cold war*). Dua konsep ini yaitu: “diplomasi pertahanan” (*defense diplomacy*) dan “diplomasi maritim” (*maritime diplomacy*). Sehingga, DPM dapat dipahami sebagai turunan (atau subset) dari diplomasi pertahanan dan/atau diplomasi maritim. Diplomasi Pertahanan merupakan “penggunaan sumber daya pertahanan pada masa damai serta dilakukan tanpa adanya tekanan eksternal sebagai upaya mencapai tujuan nasional, terutama dalam hubungan antar negara” (Cheyre, 2013). Secara lebih khusus, pelaksanaan diplomasi pertahanan dilakukan pada saat Angkatan bersenjata dan infrastruktur pertahanan (terutama Kemhan) digunakan pada masa damai sebagai alat kebijakan luar negeri (Cooper, 2013).

Menurut Muthanna (2011), pada era pasca perang dingin saat ini, penggunaan diplomasi pertahanan ditujukan dalam rangka pencegahan dan

penyelesaian konflik. Adapun berbagai kegiatan yang merefleksikan pelaksanaan diplomasi pertahanan ini mencakup Latihan dan kerja sama militer antar negara, pertukaran perwira di Lembaga pendidikan dan pelatihan, operasi gabungan multilateral, serta berbagai forum diplomatik perwira dan pejabat dalam lingkup kementerian pertahanan. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk dapat memperbaiki *confidence building measures* dan manajemen krisis melalui pergeseran norma dan sikap antar institusi militer, meningkatnya transparansi dalam hubungan pertahanan, dan menguatnya kepercayaan strategis.

Dalam berbagai studi terkait diplomasi pertahanan, penggunaan instrumen (aktor) sektor pertahanan yang biasanya dari militer seringkali dilakukan untuk mencapai tujuan dari kebijakan luar negeri. Pemahaman terkait diplomasi pertahanan ini merupakan produk dari berakhirnya perang dingin, di Indonesia telah terjadi re-orientasi militer yang ditujukan dalam melaksanakan berbagai misi dan fungsi perdamaian. Selain itu, diplomasi pertahanan juga dapat diartikan sebagai penggunaan instrument militer untuk mencapai tujuan perdamaian, sehingga ditemukannya penggunaan OMSP, seperti *humanitarian assistance and disaster relief, peacekeeping*, dan lainnya. Akan tetapi, diplomasi pertahanan juga dapat dipahami sebagai upaya diplomasi yang dilaksanakan untuk menangani atau menyelesaikan berbagai masalah atau persoalan pertahanan. Sehingga, selain penekanan “pertahanan” sebagai instrument kebijakan luar negeri, konsep ini juga memberi penekanan “pertahanan” terhadap tujuan dari kebijakan luar negeri. Berbagai definisi di atas didasarkan dari berbagai studi mengenai perundingan-perundingan *arms control*, teknologi nuklir, atau senjata.

Strategi DPM dapat memformulasikan kerangka kebijakan ideal yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap praktik diplomasi pertahanan maritim Indonesia selama ini. Sehingga dibutuhkan juga keterpaduan antara kebijakan luar negeri dan pertahanan, serta urgensi integrasi terkait berbagai instrumen pertahanan dan diplomasi (Kementerian Luar Negeri RI, 2017).



Gambar 2.2 Landasan Konseptual Kebijakan Diplomasi Pertahanan Indonesia
Sumber: Kemlu RI (2017)

Konsep diplomasi maritim juga merupakan produk berbagai kebijakan dan diskursus akademik pasca perang dingin. Diplomasi maritim sendiri dapat dipahami sebagai (a) Penggunaan berbagai instrumen kebijakan maritim (baik AL maupun *coast guard*), sebagai upaya untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri, atau (b) Penggunaan para diplomat dalam menghadapi atau menyelesaikan berbagai persoalan terkait maritim seperti delimitasi landas kontinen atau sengketa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Namun, kebanyakan studi mengenai diplomasi maritim fokus pada pemahaman pertama dan bukan yang kedua (Le Mi`ere 2014; Kraska 2011).

Sehingga berdasarkan kedua landasan definisi di atas terkait diplomasi pertahanan dan diplomasi maritim, maka Indonesia dapat memilah berbagai instrumen kebijakan yang relevan sehingga dapat diukur sudah sejauh manakah efektivitas diplomasi pertahanan maritim Indonesia. Sejak era reformasi, dalam pelaksanaan DPM sebenarnya Indonesia telah menggunakan beberapa instrumen diplomasi pertahanan maritim (meskipun pemerintah tidak pernah menggunakan istilah ini). Berbagai instrumen ini termasuk:

1. Kerja sama bilateral dengan negara-negara tetangga dan mitra strategis;
2. Kerja sama multilateral, baik dalam kerangka ASEAN maupun non-ASEAN;
3. Hukum internasional dan konvensi regional tentang keamanan maritim;
4. Operasi keamanan laut Bersama (Kementerian Luar Negeri RI, 2017).

2.1.5 Konsep Kerja Sama Indo-Pasifik

Istilah 'Indo-Pasifik' telah mengalami tiga 'gelombang wacana' di kawasan tersebut. Pada tahun 2007, terminologi Indo-Pasifik sebagai konstruksi geopolitik muncul dari pernyataan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe tentang Hindia dan Pasifik sebagai lautan kebebasan dan kemakmuran (Abe, 2007). Pada tahun yang sama, empat negara yang membentuk dialog keamanan segi empat (Quad) yaitu Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat, melakukan pertemuan perdananya. Quad 2007 tidak bertahan lama karena Australia secara sepihak mengumumkan pelepasan dirinya pada tahun 2008. Namun, pada KTT ASEAN 2017 di Filipina, keempat negara QUAD mendorong lahirnya kembali kebijakan strategis *Quadrilateral Security Dialogue (QUAD)*, yang merupakan forum dialog keamanan strategis bagi Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India. Keempat pemimpin negara-negara di atas sepakat untuk menghidupkan kembali QUAD untuk mempromosikan stabilitas dan perdamaian kawasan. Forum "QUAD 2.0" menegaskan bahwa ada tujuh agenda utama: (a) Ketertiban berbasis hukum di Asia; (b) Kebebasan navigasi dan penerbangan; (c) Menghormati hukum internasional; (d) Memperkuat konektivitas; (e) Keamanan maritim; (f) Ancaman Korea Utara dan non-proliferasi nuklir; dan (g) Terorisme.

Menurut Yoshinara (2013), kebijakan luar negeri Tiongkok dan India yang berorientasi ke laut serta visi Amerika Serikat yang tidak dapat memisahkan India dari arsitektur keamanannya telah mendorong AS untuk mulai mengembangkan konsep Indo-Pasifiknya sendiri. Sementara itu, pada bulan

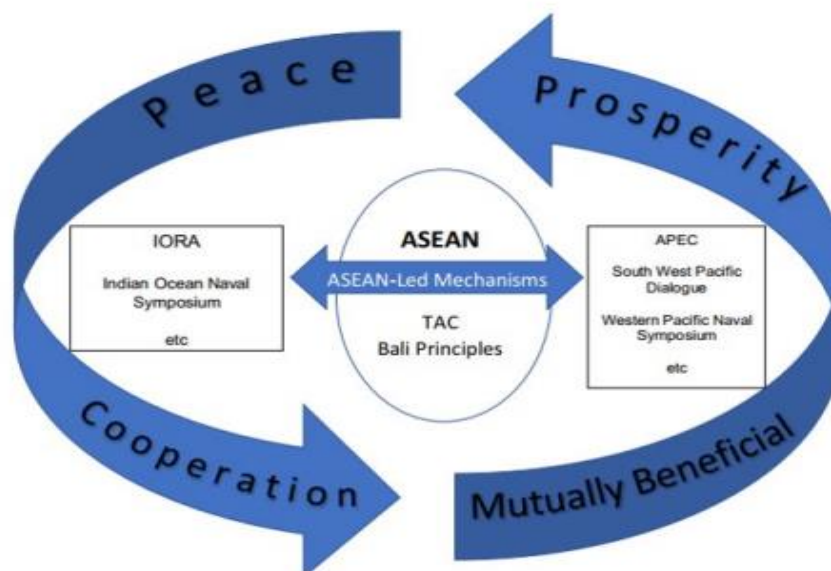
Agustus 2016, Perdana Menteri Jepang memperkenalkan "Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka/ FOIP" (Kitaoka, 2019). Strategi ini dengan cepat diterima dan diadopsi oleh AS. Sementara itu, mengutip pernyataan *White House* (2017), "Presiden Trump menegaskan kembali komitmen AS terhadap FOIP dalam kunjungan "Indo-Pasifik" ke lima negara Asia" pada 3-14 November 2017. Mengutip Medcalf (2014), konsep Indo-Pasifik telah mengalami perkembangan yang luar biasa dari konsep ruang maritim menjadi sebuah sistem strategis yang bangkit dari keterhubungan yang cepat dan kuat antara masalah keamanan dan ekonomi di antara kawasan di Pasifik barat dan samudra Hindia.

Menurut Young (1991), tidak ada bangunan institusi regional yang didasarkan pada kepentingan bersama yang terbentuk secara alami atau identitas yang serupa secara inheren. Seperti yang dikemukakan Oran Young, regionalisme atau pembangunan rezim adalah proses negosiasi dan tawar-menawar di antara negara-negara dengan kepentingan yang beragam bahkan bertentangan. Oleh karena itu, kepemimpinan adalah 'penentu kritis' bagi negara untuk menemukan kepentingan bersama dan mengurangi kemungkinan biaya dalam proses pembentukan rezim dan pembangunan institusi.

Lahirnya perspektif Indo-Pasifik telah merefleksikan posisi strategis bagi Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara menjadi titik sentral yang menghubungkan kawasan samudera Pasifik dan Hindia. Peran Indonesia sebagai *middle power* di kawasan, menyebabkan Indonesia belum dapat mengandalkan kekuatan material yang dimiliki baik dari sisi ekonomi maupun militernya untuk dapat mempengaruhi serta membentuk sebuah kondisi kawasan yang kondusif berdasarkan pendekatan kepentingan nasional dalam Hubungan Internasional. Oleh karena itu, kebijakan kawasan ditekankan pada pengembangan tatanan, mekanisme, institusi kerja sama kawasan yang memungkinkan semua negara baik besar, menengah dan kecil mengelola kepentingan bersama. Suatu mekanisme kerja sama kawasan yang memungkinkan negara-negara untuk mengembangkan kerja sama yang

saling menguntungkan dan membahas serta mengelola potensi konflik, ketidakpercayaan, kecurigaan dan berbagai bentuk ancaman lainnya.

Dinamika lingkungan strategis di Kawasan Indo-Pasifik ditandai oleh peningkatan rivalitas AS-Tiongkok, yang terefleksi dari pertentangan BRI Tiongkok vs FOIP AS. Selanjutnya juga ada revitalisasi the Quad yang berpotensi menjadi koalisi strategis kekuatan eksternal yang tidak melibatkan ASEAN. Sehingga Indonesia mengambil sikap dengan mengusulkan konsep Indo-Pasifik yang menjadikan ASEAN sebagai sentralitas dan menekankan prinsip-prinsip kebebasan, terbuka dan inklusif.



Gambar 2.3 Kerangka Kerja Sama Indo-Pasifik
Sumber: Direktorat Kerja Sama Polkam ASEAN (Kemlu RI) 2018

Sejak tahun 2018, Indonesia mengembangkan *Indo-Pacific Cooperation Concept* (IPCC), yang merupakan sebuah konstruksi Indo-Pasifik dengan karakteristik Indonesia (Laksmana, 2018a). Dalam pernyataan pers tahunannya, pada 9 Januari 2018, Retno Marsudi, selaku Menteri Luar Negari Indonesia mengumumkan konsep Indo-Pasifik baru ini. Ia menyatakan bahwa “Di tengah perubahan geopolitik regional, Indonesia yang terletak di persimpangan Samudra Hindia dan Pasifik harus terus menjadi pemain utama dalam menciptakan arsitektur kawasan regional” (Marsudi, 2018a). Dalam

pernyataannya, Marsudi juga menyatakan bahwa mengenai arsitektur regional masa depan, “Indonesia akan bekerja sama dengan negara-negara di kawasan, untuk mengembangkan payung kerjasama Indo-Pasifik” tetapi di dalamnya “sentralitas ASEAN harus dipertahankan” sebagai fokus regionalisme ini. Marsudi menegaskan kembali pada 8 Mei bahwa “Prinsip-prinsip kerja sama Indo-Pasifik Indonesia adalah inklusif, terbuka, mengembangkan kebiasaan berdialog dan menghormati hukum internasional” (2018b).

Tema yang menonjol dalam dukungan Indonesia terhadap IPCC adalah penekanan pada “sentralitas” ASEAN, seruan yang pertama kali dibuat oleh Indonesia pada KTT Kepala Pemerintahan ASEAN pada April 2018. Indonesia juga telah mendorong konsep Indo-Pasifiknya secara bilateral di dalam ASEAN. Pada September 2018, Indonesia dan Vietnam bersama-sama saling mendukung untuk mengembangkan konsep Indo-Pasifik ASEAN yang “meliputi prinsip-prinsip utama seperti sentralitas ASEAN, keterbukaan, transparansi, inklusivitas, dan penghormatan terhadap hukum internasional, sambil berkontribusi pada rasa saling percaya, saling menghormati dan saling menguntungkan” (Indonesia-Vietnam, 2018). Selain pembicaraan tentang inklusivitas, kedua pihak menggarisbawahi pentingnya menjaga keamanan dan kebebasan navigasi dan penerbangan serta perlunya demiliterisasi kawasan LTS. Indonesia juga telah mendorong inisiatif Indo-Pasifiknya ke panggung EAS, yang menyediakan platform publik di mana kekuatan Indo-Pasifik non-ASEAN signifikan lainnya seperti Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan India hadir. Indonesia secara resmi mempresentasikan konsep Indo-Pasifik pada pertemuan Menteri Luar Negeri EAS pada Agustus 2018, tetapi tanpa tanggapan resmi dari menteri EAS lainnya.

Pada November 2018, Jokowi menjadikan Indo-Pasifik sebagai fokus pidatonya sendiri di KTT EAS. Meskipun Widodo menggambarkan “Samudra Pasifik dan Samudra Hindia sebagai teater geo-strategis tunggal” (Indonesia, 2018d). Berdasarkan perspektif Indonesia, pengembangan konsep kerja sama indo-pasifik ini didasarkan pada prinsip kebebasan, keterbukaan, inklusivitas,

transparan serta menekankan pada kerja sama antar negara kawasan. Pada intinya, konsep kerja sama ini merupakan aspirasi dan alat untuk menyuarakan kepentingan Indonesia terkait dengan penguatan kerja sama di kawasan Indo-Pasifik yang diarahkan pada peningkatan kerja sama di bidang maritim, konektivitas serta agenda pembangunan berkesinambungan. Sebagai negara yang sebanyak 2/3 wilayahnya adalah lautan, maka Indonesia memiliki peluang dan tantangan dalam proses penguatan arsitektur di kawasan Indo-Pasifik.

Konsep kerja sama Indo-Pasifik yang berlandaskan politik luar negeri bebas-aktif ini juga sejalan dengan visi untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang juga menjadi arah pembangunan pertahanan negara. Dalam KTT ASEAN ke-34 di Bangkok yang berlangsung pada 22 Juni 2019, ASEAN juga telah menyepakati *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)*. Konsep kerja sama ini merupakan gagasan Indonesia sejak tahun 2018 sebagai respon atas lahirnya polarisasi dan rivalitas berbagai kekuatan besar yang dapat berpotensi mempengaruhi perdamaian, stabilitas serta upaya pencapaian kemakmuran di kawasan. AOIP ini menekankan sentralitas ASEAN dalam menjunjung prinsip perdamaian, penguatan budaya dialog dan peningkatan kerja sama. Dengan terkonsolidasinya *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*, maka Indonesia berpeluang menunjukkan peran aktif dalam memajukan kerjasama Indo-Pasifik sekaligus mempromosikan stabilitas keamanan dan kemakmuran di kawasan.

2.1.6 Teori Ancaman

Deklarasi Perang Bintang (*Stars War*), yakni sebuah perang yang mengembangkan sistem teknologi pertahanan di luar angkasa di tahun 1990-an yang dilakukan oleh Presiden Amerika Ronald Reagan berimplikasi terhadap terciptanya pergeseran paradigma konsep ancaman. Ancaman dapat dipahami sebagai setiap kegiatan yang berasal dari dalam dan luar negeri yang dinilai membahayakan wilayah negara (NKRI) dan keselamatan

bangsa atau sesuatu yang bersifat penghambat serta penghalang terhadap kepentingan nasional. Ancaman merupakan faktor utama yang menjadi dasar penangkalan (*deterrence*), bersifat aktual (nyata), dan potensial (belum nyata) (Yusgiantoro, 2019).

Berdasarkan Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015, persepsi Indonesia tentang ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari luar maupun dari dalam negeri, yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Ancaman merupakan faktor utama yang menjadi dasar penangkalan, bersifat nyata, dan potensial. Berdasarkan sifat ancaman, hakikat ancaman digolongkan ke dalam ancaman militer dan ancaman non-militer.

Ancaman militer merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal.

Ancaman non-militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum.

Untuk memahami sifat ancaman yang berubah dalam keamanan global kontemporer, maka perlu didefinisikan apa yang dipahami sebagai ancaman keamanan. Ancaman keamanan dapat didefinisikan sebagai peristiwa dengan konsekuensi yang berpotensi negatif bagi kelangsungan hidup atau kesejahteraan suatu negara, masyarakat, atau individu. Namun, upaya sederhana untuk mendefinisikan ancaman keamanan ini menunjukkan kompleksitas konsep tersebut. Pertama, definisi ini menunjukkan bahwa

ancaman keamanan mengacu pada kemungkinan kejadian di masa depan. Representasi dari ancaman ini sangat bergantung pada probabilitas yang dikaitkan dengan suatu peristiwa. Beberapa peristiwa negatif mungkin dianggap sangat tidak mungkin sehingga tidak lagi dianggap sebagai ancaman keamanan, seperti perang saudara di Amerika Serikat atau konflik militer di antara negara-negara anggota Uni Eropa.

Kedua, ancaman keamanan dicirikan oleh intensitas efek potensialnya, yaitu apakah membahayakan kelangsungan hidup atau hanya kesejahteraan manusia. Beberapa ancaman, seperti penyakit menular dan senjata pemusnah massal mempengaruhi kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia dalam waktu yang sangat cepat. Lainnya, seperti ancaman terhadap lingkungan atau mata pencaharian masyarakat, mempengaruhi kelangsungan hidup manusia secara lebih tidak langsung.

Ketiga, ancaman keamanan ditentukan oleh cakupan geografis dampaknya. Perang nuklir, misalnya, tidak hanya membahayakan seluruh wilayah, tetapi juga kehidupan di bumi secara umum. Sebaliknya, efek perang saudara umumnya terbatas pada negara bagian atau subkawasan. Akhirnya, sifat ancaman keamanan dapat diklasifikasikan berdasarkan objeknya. Sebagai konsekuensi dari kompleksitas dan subjektivitas penilaian ancaman, pemahaman kita tentang apa yang menghadirkan ancaman keamanan di abad kedua puluh satu telah banyak berubah. Secara khusus, berakhirnya Perang Dingin telah menyebabkan penilaian ulang mendasar terhadap ancaman keamanan utama (Krahmann, 2005).

Ancaman baru, seperti terorisme, kejahatan transnasional, konflik sipil, dan HIV/ AIDS jauh lebih luas dan mungkin terjadi. Dibandingkan dengan perang antarnegara, konflik sipil tidak hanya rata-rata sekitar lima kali lebih sering, tetapi jumlah konflik internal juga terus meningkat sejak akhir Perang Dunia II, sementara terjadinya perang intranegara relatif stabil.

Salah satu kluster ancaman terhadap keamanan internasional adalah ancaman yang bersifat lintas batas berupa kejahatan lintas negara

(*Transnational Organized Crimes*). Selain berkembang pesat, kejahatan lintas negara juga memiliki karakteristik yang sangat kompleks. Meningkatnya ancaman kejahatan lintas negara tersebut tidak simetris dengan kemampuan negara untuk mengatasinya, sehingga kerjasama internasional untuk secara kolektif menanggulangnya menjadi solusi sementara dalam penanganannya. Dalam *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime*, terdapat delapan jenis kejahatan lintas negara, di mana beberapa jenis di antaranya memiliki dimensi maritim. Termasuk ke dalam delapan jenis kejahatan lintas negara tersebut, adalah perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, pembajakan di laut, penyelundupan senjata dan terorisme (termasuk dalam kategori ini adalah terorisme maritim), pencucian uang, kejahatan ekonomi internasional dan kejahatan dunia maya (Marsetio., 2014).

Kisaran ancaman dalam domain maritim sangat luas. Ancaman konvensional di masa damai termasuk klaim negara Kawasan sehubungan dengan batas-batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan kegiatan di sana, luas wilayah perairan dan hak lintas damai, dan penangkapan ikan secara ilegal. Ancaman konvensional meliputi konflik berintensitas rendah seperti pemberontakan dan kemungkinan konflik berintensitas tinggi di berbagai belahan dunia, seperti Teluk Persia (Arab), Semenanjung Korea, atau Selat Taiwan. Selain itu, ancaman non-konvensional dalam domain maritim telah meningkat secara dramatis dalam keragaman dan intensitas sejak awal 1990-an. Mereka termasuk terorisme transnasional dan jaringan kriminal yang terlibat dalam perdagangan gelap narkoba, manusia, dan senjata. Pembajakan adalah masalah yang berkembang di beberapa bagian dunia, khususnya di Asia Tenggara dan di lepas pantai timur dan barat Afrika. Kombinasi terorisme transnasional dan pembajakan dapat secara serius mengganggu arus perdagangan internasional (Vego, 2008).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka ancaman merupakan segala peristiwa dengan konsekuensi yang berpotensi negatif bagi kelangsungan hidup atau kesejahteraan suatu negara, masyarakat, atau individu. Dalam

pembahasan penelitian akan dielaborasi lebih lanjut mengenai dinamika ancaman yang ada di kawasan Indo-Pasifik, sehingga hal inilah yang menyebabkan urgensi penguatan peran diplomasi TNI AL Indonesia untuk mencapai kestabilan Kawasan regional serta mendukung sistem pertahanan negara Indonesia.

2.1.7 Teori Peran

Menurut Holsti (1970), dalam teori peran, negara dipahami sebagai aktor yang menyusun peran mereka sendiri untuk bertindak dalam sistem internasional. Ada dua sumber dari konsep peran, yaitu: (1) persepsi pembuat kebijakan, yang diambil dari pengalaman sejarah nasional, tradisi politik dalam negeri, geografi, sumber daya, opini publik, dan kebutuhan sosial ekonomi; dan (2) ekspektasi eksternal yang ditempatkan pada aktor yang memainkan peran tersebut. Sejak karya awal Holsti, telah terjadi perkembangan yang signifikan dalam kekuatan deskriptif dan penjelasan teori peran. Latihan dalam teori peran telah bergerak melampaui identifikasi peran Holsti untuk memeriksa bagaimana peran dibangun dan diberlakukan (Cantir & Kaarbo, 2012). Dengan perkembangan tersebut, proses lokasi peran memberikan kerangka analisis yang cocok untuk menjelaskan perubahan dalam kebijakan luar negeri. Peran dapat dipahami sebagai proses dimana aktor sosial menempatkan peran yang cocok dalam struktur sosial. Menurut Thies (2010), dalam 'menempatkan' dirinya sendiri, negara mengamati struktur internasional dan kemudian secara refleksi memantau konsepsi perannya, bersama dengan kemampuan material, yang menghasilkan penyesuaian agar lebih sesuai dengan tuntutan dan isyarat struktur sosial. Upaya penting untuk menjelaskan mekanisme ini adalah menganggap proses lokasi peran sebagai 'permainan sosialisasi' (Thies, 2010).

Dalam permainan sosialisasi, negara yang muncul menghadapi dua kekuatan eksternal: 'alam' atau struktur sistem internasional, dan kekuatan lain. Agar permainan sosialisasi berfungsi, Thies menyusun empat peran untuk para pemain (negara berkembang, negara kecil, kekuatan regional, dan kekuatan besar) berdasarkan materi relatif dan kekuatan ide mereka (Thies, 2012).

Permainan sosialisasi terjadi ketika negara-negara yang muncul berusaha menemukan peran untuk diberlakukan. Dalam proses menduduki dan menjalankan peran, negara dipengaruhi oleh variabel internal (ego), seperti identifikasi diri pemimpin, dan variabel eksternal (pengubah), seperti keseimbangan kekuasaan atau pengaturan lembaga internasional. Melalui permainan sosialisasi, Thies menunjukkan bahwa teori peran melengkapi teori struktural yang ada dengan mengakomodasi variabel material dan ideasional dalam menganalisis kebijakan luar negeri. seperti perimbangan kekuatan atau pengaturan lembaga-lembaga internasional. Melalui permainan sosialisasi, Thies menunjukkan bahwa teori peran melengkapi teori struktural yang ada dengan mengakomodasi variabel material dan ideasional dalam menganalisis kebijakan luar negeri. seperti perimbangan kekuatan atau pengaturan lembaga-lembaga internasional. Melalui permainan sosialisasi, Thies menunjukkan bahwa teori peran melengkapi teori struktural yang ada dengan mengakomodasi variabel material dan ideasional dalam menganalisis kebijakan luar negeri.

Teori peran ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsepsi serta penerapan peran Indonesia, khususnya sebagai "*middle power*" di kawasan Indo-Pasifik. Analisis tersebut mengidentifikasi pola konsepsi peran yang konsisten, seperti 'mediator' dan 'pembangun jembatan', bersama dengan konsepsi peran yang muncul seperti 'promotor demokrasi'. Di masa kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekuatan menengah yang dimilikinya, mengedepankan perannya sebagai negara maritim yang terefleksi dalam visi poros maritim dunia. Berkenaan dengan proyeksi maritim eksternal Indonesia, maka Angkatan Laut Indonesia memainkan perannya untuk mengedepankan upaya kerja sama, komunikasi diplomatik, serta terus fokus pada penegakan hukum dan keamanan regional kawasan Indo-Pasifik dalam mendukung sistem pertahanan negara.

2.1.8 *Naval Diplomacy* (Diplomasi Angkatan Laut)

Diplomasi dalam *Oxford English Dictionary* didefinisikan sebagai profesi, aktivitas, atau keterampilan mengelola hubungan internasional, biasanya oleh perwakilan suatu negara di luar negeri. Sedangkan menurut *Webster Dictionary*, diplomasi adalah seni dan praktek penyelenggaraan negosiasi antar bangsa seperti dalam hal menyelenggarakan perjanjian. Dengan demikian diplomasi bagi negara adalah tentang urusan luar negeri, upaya untuk mengamankan dan mempromosikan kepentingan di luar batas-batas nasional dalam berbagai cara.

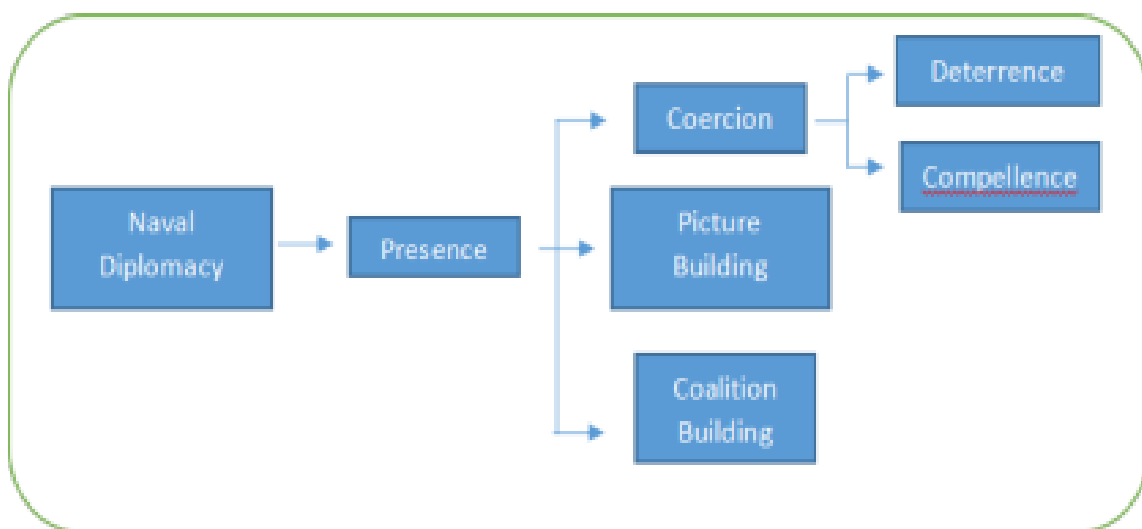
Diplomasi angkatan laut adalah bagian dari diplomasi umum dan bukan sekadar 'barang bebas' dari kemampuan militer. Tentu saja, ada hubungan langsung antara kemampuan dan kredibilitas dan ini juga harus diakui. Diplomasi adalah sarana komunikasi formal dan informal antara aktor internasional di panggung dunia; komunikasi apapun dapat dilakukan dengan cara yang tak terhitung banyaknya dan aktor akan berusaha untuk berkomunikasi melalui sarana yang mereka miliki. Oleh karena itu, negara maritim dengan kekuatan angkatan laut akan terlibat dalam diplomasi angkatan laut (Rowlands, 2018).

Jika diplomasi angkatan laut kontemporer sedikit dipahami, mungkin karena itu adalah bagian dari topik yang lebih luas yang meskipun memiliki sejarah panjang dan studi besar tetap sangat tidak jelas. Persepsi umum tentang diplomasi adalah komunikasi formal antar negara. Itulah makna yang diberikan dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Griffiths & O'Callaghan (2013), menggemakan bahwa banyak hal di bidang hubungan internasional yang menyatakan bahwa diplomasi adalah 'seluruh proses yang dilalui negara-negara dalam melakukan hubungan luar negerinya'.

Diplomasi angkatan laut identik dengan 'diplomasi kapal perang' (*gunboat diplomacy*) yang bersifat koersif. Pemaksaan tentu saja merupakan kemungkinan penggunaan kekuatan angkatan laut selama perang, tetapi tidak secara keseluruhan. 'Spektrum perilaku' Nye (2004), antara aktor internasional, di mana kekuasaan diklasifikasikan dari '*hard power*' hingga '*soft power*', menawarkan kerangka kerja sederhana untuk menempatkan diplomasi angkatan laut. Dalam penggunaan '*Hard Power*', Kekuatan angkatan laut dapat digunakan

untuk menimbulkan kerusakan hukuman pada aktor untuk mengamankan perubahan perilaku. Sementara itu, '*Soft Power*', digunakan untuk membuat panggilan pelabuhan yang ramah dan membuka pintu mereka bagi pengunjung untuk mengesankan, mendidik dan mempengaruhi, untuk membina hubungan dengan mitra dan untuk membangun kapasitas mereka. Di antara keduanya terdapat banyak kemungkinan untuk interaksi yang dalam beberapa hal memajukan kepentingan negara mereka (Nye, 2004).

Model diplomasi angkatan laut yang ada mengasumsikan hubungan bilateral dan mekanistik: yaitu, satu pihak melakukan tindakan terhadap pihak lain untuk menghasilkan reaksi yang dianggap menguntungkan bagi kepentingannya sendiri. Model aksi-reaksi ini, dijelaskan oleh James Cable dalam istilah 'penyerang' dan 'korban', tidak perlu dibatasi pada paksaan dan dapat diterapkan di seluruh spektrum diplomasi angkatan laut. Namun, itu terbatas. Realitas hubungan internasional jauh lebih kompleks, banyak audiens dan pemangku kepentingan ada dalam setiap hubungan komunikatif (Cable, 2016) .



Gambar 2.4 Framework Naval Diplomacy oleh Geoffrey Till
Sumber: Agastia (2016)

Fungsi diplomasi adalah fungsi paling khas dari Angkatan Laut. Fungsi ini berkaitan dengan manajemen kebijakan luar negeri melalui pengerahan

Universitas Pertahanan RI

kekuatan Angkatan Laut secara terbatas. Kekuatan diplomatis dari Angkatan Laut dapat mendukung kebijakan negara khususnya dalam masa negosiasi maupun dalam interaksi internasional secara umum (Booth K. , 2015). Menurut Ken Booth dalam bukunya "*Navies and Foreign Policy*" terdapat lima taktik dalam *naval diplomacy* yaitu: 1) *Standing demonstrations of naval power*; 2) *Specific operational deployments*; 3) *Naval Aid*; 4) *Operational visits*; 5) *Specific goodwill visits*. Sementara Cromwell mengidentifikasi peran utama kapal perang. Sebagai suatu instrument/alat, diplomasi kapal perang memiliki tujuh aspek dasar yang mencakup:

- 1) *Versalility* (Keserbagunaan), Hal ini mengacu pada kemampuan yang dimiliki kapal perang. Mencakup kemampuan yang dimilikinya sendiri ataupun secara kelompok untuk melakukan berbagai tugas yang sifatnya sosial, politik, kemanusiaan, mapun yang murni bersifat militer. Dari keseluruhan sistem senjata yang ada dalam inventaris sebuah negara, kapal perang jelas yang sifatnya paling dinamis.
- 2) *Controllability* (Keterkendalian), Kualitas ini didasarkan pada dua aset yang dimiliki oleh kapal perang di sebagian besar situasi, yaitu potensi eskalasi yang mereka miliki di satu sisi dan daya tariknya di sisi lain. Terdapat beberapa kombinasi kapal perang yang memiliki kecocokan dalam konfrontasi maritim mulai dari yang terendah hingga pada penggunaan kekuatan tingkat tertinggi. Sebagai instrumen eskalasi, kapal perang memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan cabang angkatan bersenjata lainnya, seperti: Peningkatan penggunaan kekuatan dapat lebih jelas digradasi, serta tidak adanya populasi penduduk di laut menghilangkan banyak faktor rumit. Non-teritorialitas media tempat kapal perang beroperasi memberikan beberapa keunggulan dibandingkan sistem senjata lainnya. Hal ini berarti bahwa demonstrasi serta uji kemauan bisa saja terjadi, dan tanpa harus menanggung risiko yang merupakan konsekuensi tak terelakkan jika dilakukan di darat. Seperti perang tank di padang pasir, diplomasi angkatan laut memiliki kejelasan dan tidak adanya komplikasi tambahan

yang biasanya hadir dengan penggunaan instrumen lain dari '*diplomacy of violence*' (diplomasi kekerasan).

- 3) *Mobility* (Mobilitas), peran Ini mengacu pada kemudahan kapal perang dapat bergerak, relatif cepat dan biasanya dapat secara mandiri untuk menghadapi situasi yang tidak terduga baik dalam jarak dekat maupun jauh yang merupakan bahan politik internasional. Penyebaran kapal perang di berbagai titik tertentu dapat memenuhi kebutuhan di berbagai situasi yang tidak memungkinkan bagi pesawat dan pasukan darat untuk hadir karena tidak relevan, tidak pantas, atau tidak dapat diakses. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, kapal perang dapat menjadi satu-satunya instrumen yang memberikan pilihan kepada pemerintah dalam situasi tertentu.
- 4) *Projection ability* (Kemampuan proyeksi), Kapal perang tidak hanya relatif mobile tetapi juga merupakan pengangkut massal yang efisien yang memiliki senjata mereka sendiri, pasukan, tank, pesawat terbang, kapal pendarat, dan berbagai perangkat keras militer lainnya. Kemampuan ini memungkinkan kelompok tempur untuk mengancam atau melawan kapal lain, ataupun untuk memproyeksikan kekuatan terhadap daratan dengan serangan udara, serangan amfibi, atau pemboman laut. Kemampuan kapal perang yang secara bebas dapat melintasi lautan, adanya muatan yang dapat dibawa oleh kapal perang, serta berbagai akses pendukungnya, menjadikannya satu-satunya sarana yang digunakan oleh beberapa negara untuk menjadi kekuatan militer di wilayah yang jauh.
- 5) *Acces potensial* (Potensi akses), "*The sea is one*", sehingga terdapat banyak utilitas kapal perang muncul dari karakter media di mana mereka beroperasi. Meskipun ada berbagai tantangan terhadap 'kebebasan laut' tradisional melalui proliferasi klaim nasional dan instalasi tetap, namun tetap benar bahwa pergerakan angkatan bersenjata melintasi laut jauh lebih mudah daripada di darat atau di udara. Akibatnya, dalam klise besar angkatan laut ketiga, sebuah negara dengan angkatan laut

berpotensi menjadi tetangga semua negara dengan pantai. Tanpa kapal perang, maka hubungan yang dimiliki suatu negara dengan tetangga potensialnya, betapapun jauhnya, akan tereduksi cakupannya. Meskipun sebagian tugasnya dapat dilakukan oleh kapal dagang, tetapi tanpa kemampuan potensi defensif dan ofensif yang dimiliki oleh kapal perang maka tidak ada alternatif lain yang dapat diambil oleh negara-negara merdeka untuk dapat memaksimalkan hubungannya dengan negara lain.

- 6) *Symbolism*, karakter kapal perang terutama dengan tipe terbesar, menjadikannya simbol dan perwakilan yang sangat berguna dan menunjukkan niat dan komitmen suatu negara. Martin (2011), telah membahas kualitas kapal perang ini dengan sangat jelas, dia telah menulis bahwa: “Berbagai macam kegiatan angkatan laut dilakukan di masa damai yang bertujuan untuk membawa pulang kepada orang lain kekuatan dan khususnya kekuatan angkatan laut negara yang bersangkutan”. Konsepsi bahwa kapal adalah bagian kecil dari kedaulatan nasional membuatnya sangat cocok untuk melambangkan negara asalnya. Selain itu, untuk alasan yang sama, pemerintah selalu memberikan perhatian yang cermat terhadap cara kapal dan bendera mereka diperlakukan dan penerimaan yang mereka berikan kepada negara lain.
- 7) *Endurance* (Ketahanan), selain memiliki nilai kualitas penarikan yang berharga, kapal perang juga dapat memiliki daya tahan yang mengesankan. Mereka dapat berkeliaran, dengan sinyal yang sesuai dalam berbagai situasi, baik dalam jarak pandang dekat, maupun pada jarak tertentu yang masih dalam jangkauan. Kapal perang dapat menempatkan dirinya menjadi ‘ancaman yang tidak jelas’. Sebagai instrumen diplomasi, kapal perang dapat berdekatan dan juga dapat dipindahkan tetapi tetap berkomitmen (Booth K. , 2015, pp. 33-35).

Berdasarkan dua pendapat tersebut maka penggunaan kapal perang sebagai alat diplomasi memiliki substansi sebagai berikut: (1)

Kehadirannya/lamanya di suatu daerah, (2) Kemampuan kekuatannya dan kekhasan untuk memberikan dampak penangkalan terhadap lawan atau bakal lawan yang dituju (Antariksa A. Y., 2014).

Temuan utama dan kesimpulan dapat dipecah menjadi enam bidang utama. Definisi pertama yaitu: Diplomasi angkatan laut sebagai penggunaan aset angkatan laut dan maritim sebagai instrumen komunikatif dalam hubungan kekuatan internasional untuk memajukan kepentingan para aktor yang terlibat. Model dan kerangka kerja diplomasi angkatan laut yang ada, pada dasarnya, adalah perkiraan berbasis peristiwa dari penggunaan 'kapasitas cadangan' yang melekat pada angkatan laut militer ketika tidak berperang untuk mempengaruhi aktor negara lainnya. Oleh karena itu mereka tidak cukup untuk abad ke-21.

Pemeriksaan rinci karya Mahan untuk referensi diplomasi angkatan laut mengungkapkan dua tema besar. Dalam *soft* dan *hard power* abad ke-21, Mahan dapat dikatakan memandang angkatan laut baik sebagai instrumen diplomasi koersif maupun sebagai agen reputasi atau status nasional. Prinsip yang digunakan oleh kekuatan angkatan laut yang mengancam ini adalah salah satu pencegahan yang akrab bagi banyak praktisi kekuatan laut saat ini.

Sementara itu, menurut Richmond (1982), 'Kekuatan laut, merupakan bentuk kekuatan nasional yang mampu memberi bobot pada kebijakan nasional'. Seperti pendahulunya, fokus Richmond pada perang mendominasi karyanya, tetapi pemikirannya tentang kegunaan kekuatan angkatan laut pada masa damai dapat ditemukan di halaman-halaman publikasinya. Dia menghubungkan ekspansi Kerajaan Inggris dengan kekuatan angkatan laut dan melihatnya sebagai sarana untuk mencapai kebesaran nasional dan, pada akhirnya, perdamaian:

“Semua negara angkatan laut yang lebih besar meyakinkan dunia bahwa angkatan laut yang besar adalah jaminan perdamaian yang paling pasti; bahwa itu memberikan keamanan terhadap perang, dan karena itu merupakan lembaga yang sangat bermanfaat (Richmond, 1982)”.

Tidak seperti Mahan dan Corbett, Richmond juga mengingatkan pembacanya tentang peran angkatan laut yang bersifat non-militer lainnya seperti bantuan kemanusiaan, evakuasi non-pejuang dan penegakan perdamaian, meskipun dalam istilah yang berbeda. Masing-masing cocok dengan rangkaian luas diplomasi angkatan laut. Yang jelas dia berpikir, menulis, dan mengajarkan tentang hubungan antara kekuatan dan diplomasi serta cara-cara agar angkatan laut bisa digunakan sebagai 'instrumen tata negara'. Berkonsentrasi pada peran diplomatik Booth (2015), dapat dilihat bahwa diplomasi angkatan laut memiliki tiga elemen dasar, yaitu:

1. Negosiasi dari kekuatan, merupakan demonstrasi politik kekuatan angkatan laut yang membutuhkan 'kehadiran', termasuk kemampuan untuk beroperasi di udara dan memproyeksikan kekuatan militer ke darat, serta menguasai lingkungan angkatan laut tradisional. Negosiasi Booth dari kekuatan memerlukan sejumlah tujuan tambahan seperti jaminan sekutu, peningkatan posisi tawar dan kemampuan untuk mempengaruhi jalannya negosiasi diplomatik.
2. Manipulasi, merupakan point kedua dari elemen diplomatik Booth yaitu merupakan perpanjangan dari taktik pengaruh yang pertama. Booth sendiri mengakui kesulitan dalam membuat pembedaan yang jelas antara pelaksanaan kekuatan angkatan laut dan pelaksanaan pengaruh angkatan laut. Fungsi dari point ini yaitu memperkuat posisi tawar, menciptakan ancaman pihak ketiga (*proxy threats*), dan dengan mempertontonkan kekuatan Angkatan Laut di laut lepas untuk menarik perhatian.
3. Elemen ketiga dari peran diplomatik Booth adalah *prestise*. Kekuatan AL di tingkat domestik akan mampu membentuk ketenangan psikologis, memproyeksikan kekuatan armada laut yang dimiliki, serta memproyeksikan citra suatu negara agar disegani oleh pihak asing. Prestise dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan keamanan negara melalui peningkatan reputasi serta kemampuan militer, citra sebagai negara potensial untuk dijadikan aliansi ataupun kemampuan

negara untuk memberikan bantuan militer, penghormatan dalam pengambilan keputusan internasional dan juga kecenderungan negara dalam memenangkan konflik. Terdapat banyak keuntungan yang dapat diperoleh oleh suatu negara dari prestise ini dalam upaya diplomasi. Dalam suatu perundingan, negara yang memiliki prestise akan lebih sering dilibatkan. Negara yang memiliki prestise akan mendapatkan keramahan diplomatik karena memiliki kekuatan dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Secara khusus dalam konteks diplomasi, prestise meningkatkan penghormatan, rasa segan, respon cepat dari berbagai pihak dan juga meningkatkan kepemimpinan negara dalam berbagai media interaksi internasional (Booth K. , 2015).

Naval diplomacy selalu memiliki peran penting dalam diplomasi. Peran ini memiliki rekam jejak sejarah yang sangat panjang dan seperti yang dikatakan Murfett (2012), terlepas dari perubahan besar yang telah terjadi di dunia sejak era pertengahan Victoria, angkatan laut memainkan peran koersif baik besar atau kecil. Semua aktivitas angkatan laut harus mendukung kebijakan politik. Doktrin maritim Inggris menggambarkan pemaksaan sebagai ancaman atau penggunaan tindakan terbatas untuk mencegah kemungkinan penyerang atau pemaksanya untuk mematuhi demarkasi atau resolusi diplomatik (Till, 2018). Pemaksaan atau sesekali disebut “dorongan koersif”, terdiri dari dua dimensi yang sangat terkait erat yakni pencegahan dan kesempurnaan.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai upaya untuk tercapainya kesempurnaan dalam hasil penelitian, maka dibutuhkan beberapa *literature review* yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam poin ini peneliti akan mengelaborasi beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul dan esensi dari penelitian ini. Beberapa persamaan yang ada di dalam penelitian sebelumnya yaitu terkait dengan Diplomasi Angkatan Laut serta Kawasan Indo-Pasifik. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan:

1. Penny Radjendra. 2022. Penempatan Strategis Indonesia Guna Menghadapi Kompetisi Geopolitik AS-Tiongkok di Kawasan Indo-Pasifik dalam Mendukung Pertahanan Negara – Disertasi Program Studi Doktorat Prodi Ilmu Pertahanan, Konsentrasi Strategi Pertahanan, Program Doktorat Unhan RI.

Hasil Penelitian:

Dalam disertasi ini, peneliti mengelaborasi mengenai rivalitas antar AS-Tiongkok sebagai dua kekuatan yang menjadi hegemoni di kawasan Indo-Pasifik serta polarisasi antar negara kawasan yang condong ke negara tertentu sesuai dengan kepentingan nasionalnya masing-masing. Indonesia sebagai *middle power* kawasan berperan dalam menjaga stabilitas keamanan regional melalui kerja sama kawasan dan tidak tergabung dalam aliansi pertahanan manapun. Dengan mengedepankan polugri Indonesia yang bebas-aktif, maka Indonesia dapat bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan Internasional dan tidak mengikatkan diri secara prioritas kepada satu kekuatan dunia.

2. Angkasa Dipua, Nuddin Harahap, Dhiana Puspitawati, Faisal Aminuddin, dan Lukman Yudho Prakoso. 2021. *Sea Defense Strategy the Indonesian Navy in Dealing with the South China Sea Conflict*. ISSN: 0171-4996, Italienisch Vol. 11, No. 2.

Hasil Penelitian:

Dalam penelitiannya dijelaskan mengenai Strategi yang diimplementasikan oleh TNI Angkatan Laut dalam rangka Menghadapi Konflik yang ada di Laut China Selatan. Dinamika lingkungan strategis dalam lingkup global, regional dan nasional telah menyebabkan banyak negara menggunakan "*second track diplomacy model*" sebagai Langkah yang dianggap efektif untuk mengatasi permasalahan antar negara. Mengingat luasnya wilayah lautan Indonesia, maka metode strategi pertahanan maritim dirasa dapat untuk mengimplementasikan model diplomasi ini. Selain itu penelitian ini juga menjelaskan mengenai teori

Trinitas Angkatan Laut oleh Ken Booth, di mana terdapat 3 peran utama yang dilaksanakan oleh Angkatan Laut di semua negara yaitu: peran militer (*military role*), peran polisionil (*constabulary role*), dan peran diplomasi (*diplomacy role*). (Dipua, Harahap, Puspitawati, Aminuddin, & Prakoso, 2021).

3. Rodon Pedrason. 2021. Indo-Pasifik dalam perspektif geopolitik dan geostrategi. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, Vol. 7, No. 1

Hasil Penelitian:

Artikel ini mengelaborasi mengenai Kawasan Indo-Pasifik dalam perspektif geostrategi dan geopolitik. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa region Indo-Pasifik merupakan sebuah perkembangan isu baru dalam politik internasional. Luas wilayah dan pentingnya konektivitas yang menjamin keamanan di laut serta aktifitas ekonomi setiap negara yang dipengaruhi oleh kestabilan dan keamanan maritim menjadi pondasi pemikiran yang melatar belakangi munculnya istilah Indo-Pasifik sebagai sebuah “kawasan” baru dalam dinamika politik dan keamanan global. Adanya kepentingan setiap negara di Kawasan untuk mengontrol berbagai akses yang berkonsekuensi pada keuntungan politik dan ekonomi, mendorong dinamika pergeseran kekuatan yang dipengaruhi oleh berbagai kebijakan keamanan, terutama negara-negara yang memiliki kemampuan dan pengaruh dalam membentuk struktur keamanan di Indo-Pasifik. Penelitian ini menjelaskan bahwa kondisi tersebut menggambarkan perspektif antar aktor (negara) dalam memandang perilaku aktor lain sebagai ancaman terhadap kepentingan strategis (Pedrason R. , 2021).

4. Amarulla Octavian, Priyo Cahyono, Widodo Setiyo. 2020. *The Influence Of Indonesian Navy Diplomacy Through Naval Presence On The Effectiveness Of Maritime Operations In The North Natuna Sea. Internasional Journal* Vol 11, NO. 4 (54-60).

Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil analisis dengan SPSS untuk windows versi 25, tingkat pengaruh diplomasi TNI AL melalui kehadiran angkatan laut (R²) memiliki nilai 61,4% pada efektivitas maritim operasi di Laut Natuna Utara. Jadi, bisa disimpulkan bahwa keberadaan unsur Angkatan Laut Indonesia di Laut Natuna Utara adalah mampu memberikan pengaruh yang cukup besar. Ini juga berarti ada 38,6% faktor lain di luar penelitian ini yang juga memiliki pengaruh tentang efektivitas operasi maritim di Laut Natuna Utara. Namun, tingkat pengaruh diplomasi TNI AL melalui kehadiran angkatan laut masih bisa ditingkatkan melalui cara lain, yaitu meningkatkan kekuatan dan kemampuan elemen Angkatan Laut Indonesia serta meningkatkan frekuensi kehadiran dan penambahan elemen derajat operasional.

5. Noraini Zulkifli, Muhamad Nazrul Basar, Azrul Azlan Abdul Rahman. (2020). *The Modernisation of Indonesian Naval Forces In Jokowi Era*. Jebat: *Malaysian Journal of History, Politics & Strategic Studies*.

Hasil Penelitian:

Dalam artikel ini, terdapat pembahasan mengenai penetapan visi Indonesia sebagai PMD. membahas tentang penetapan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia

6. David Scott. (2019). *Indonesia Grapples with the Indo-Pacific: Outreach, Strategic Discourse, and Diplomacy*. NATO Defense College Foundation (Rome).

Hasil Penelitian :

Dalam artikel ini, dijelaskan mengenai bagaimana seharusnya keterlibatan Indonesia dalam struktur regional dan subregional di Kawasan samudera pasifik dan hindia harusnya menjadi lebih aktif. Terdapat tiga konsep wacana strategis di dalamnya yaitu: “Perjanjian Indo-Pasifik” Natalegawa (2013–2014), penggerak “perhubungan maritim” Widodo (2014 dan seterusnya), dan “Konsep Kerjasama Indo-Pasifik” saat ini (IPCC; 2018 dan seterusnya). Diplomasi ditempuh terkait hubungan Indonesia dengan Australia, Jepang, China, India, dan Amerika Serikat. Dalam

kesimpulannya dijelaskan bahwa, sebagai aktor yang cukup penting di Kawasan Indo-Pasifik, tetapi lemahnya Angkatan Laut Indonesia berimplikasi terhadap lemahnya sikap Indonesia terhadap kehadiran Tiongkok di Kawasan. Sehingga untuk menghadapi hal tersebut, disarankan agar Indonesia melakukan kerja sama yang lebih erat dan inklusif dengan Jepang dan USA.

7. Trio Sirmareza. 2017. *Naval Diplomacy* Dalam Pengiriman Satuan Tugas Maritim Tentara Nasional Indonesia di *United Nations Interim Force In Lebanon*. Jurnal Diplomasi Pertahanan Vol 3 No. 1.

Hasil Penelitian:

Artikel ini mengelaborasi mengenai keterlibatan Angkatan Laut Indonesia dalam misi UNIFIL MTF, sebagai upaya *naval diplomacy* yang dilakukan oleh Indonesia. Dalam artikel ini juga menganalisis *naval diplomacy* dalam pengiriman Satgas Maritim TNI dan kontribusinya terhadap pencapaian kepentingan nasional dan sasaran kebijakan luar negeri Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat dua penekanan kepentingan yang dilakukan oleh Indonesia dalam misi ini, yaitu: (1) Pemeliharaan ketertiban dunia yang merupakan refleksi dari amanat konstitusi, serta (2) Meningkatkan peran Indonesia sebagai *Middle Power* secara global.

8. Harry Riana dan Arfin Sudirman. 2016. *Maritime Diplomacy* Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia. Jurnal Wacana Politik Vol 1 No. 2 (175 – 182).

Hasil Penelitian:

Artikel ini mengeksplorasi mengenai kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara maritim, fakta tersebut seharusnya menjadikan Diplomasi Maritim sebagai alat yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan pembangunan keamanan maritim Indonesia. Penataan sektor maritim Indonesia pada visi *Global Maritime Fulcrum (GMF)* juga menjadi urgensi, dengan melihat kekuatan dan kelemahan kapabilitas TNI AL sebagai salah satu instrumen diplomasi Maritim menuju pembangunan

keamanan maritim Indonesia. Gagasan terpenting dalam artikel ini adalah bahwa penjaminan keamanan maritim secara regional dan global harus menjadi prioritas Diplomasi Maritim Indonesia.

9. A Yani Antariksa. 2014. Diplomasi Pertahanan Laut Indonesia Dalam Konteks Pergeseran Geopolitik di Kawasan Pada Masa Depan. Jurnal Pertahanan. Vol 4 No. 2.

Hasil Penelitian:

Dalam penelitiannya di jurnal ini dijelaskan mengenai bahwa terjadinya pergeseran geopolitik ke Kawasan asia pasifik terutama di Kawasan Laut China Selatan berimplikasi terhadap bergesernya pusat pertumbuhan ekonomi, politik serta keamanan serta menjadikan Kawasan asia pasifik menjadi Kawasan penting bagi Amerika yang berpotensi terhadap kemungkinan persaingan dan ancaman yang dapat menyebabkan konflik militer abad ke-21. Sehingga untuk mengatasi perkembangan hubungan geopolitik dan geostrategi tersebut, maka diplomasi pertahanan (khususnya *Naval Diplomacy*) memegang peran penting dengan keamanan laut (*maritime security*) dan menjadi ujung tombak dalam perhatian hubungan keamanan regional di Asia Pasifik dengan diimbangi kekuatan Angkatan Bersenjata yang memadai. Dalam penelitian tersebut dijelaskan mengenai apa itu diplomasi, bagaimana kedudukannya dalam hubungan internasional, apakah yang dimaksud dengan diplomasi pertahanan dan diplomasi AL, apa yang bisa dilakukan Angkatan Laut ke depan di abad XXI, peran dan struktur apa yang dibutuhkan dan kesiapan sumber daya manusia dan alat utama yang bagaimana yang harus dimiliki (Antariksa A. Y., 2014).

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama, Judul, dan Jenis Tulisan	Persamaan	Perbedaan
1	<p>Penny Radjendra Penempatan Strategis Indonesia Guna Menghadapi Kompetisi Geopolitik AS-Tiongkok di Kawasan Indo-Pasifik dalam Mendukung Pertahanan Negara – Disertasi Program Studi Doktorat Prodi Ilmu Pertahanan, Konsentrasi Strategi Pertahanan, Program Doktorat Unhan RI, 2022.</p>	<p>Fokus terhadap peran yang dimainkan oleh Indonesia di kawasan Indo-Pasifik sebagai <i>middle power</i> dengan mengedepankan kerja sama dan polugri Indonesia yang bersifat bebas-aktif.</p>	<p>Fokus dalam penelitian tidak hanya pada rivalitas AS-Tiongkok seperti penelitian terdahulu, tetapi juga terhadap kompleksitas dinamika ancaman kawasan Indo-Pasifik secara umum.</p>
2	<p>Angkasa Dipua, Nuddin Harahap, Dhiana Puspitawati, Faishal Aminuddin, Lukman Yudho P <i>Sea Defense Strategy the Indonesian Navy in Dealing with the South China Sea Conflict</i> – Italienisch Journal, Volume 11, Nomor 2, 2021.</p>	<p>Penelitian ini menganalisis tentang diplomasi Angkatan laut menurut ken booth serta model <i>second track diplomacy</i> sebagai langkah yang dinilai efektif untuk menyelesaikan permasalahan antar negara di tengah dinamika lingkungan strategis global, regional, dan nasional.</p>	<p>Penelitian ini akan menganalisis konsep trinitas Angkatan Laut Ken Booth terutama peran diplomasi TNI Angkatan Laut di kawasan indo-pasifik dalam mendukung sistem pertahanan negara.</p>
3	<p>Rodon Pedrason, Indo-Pasifik dalam perspektif geopolitik dan geostrategi – Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI), Volume 7, Nomor 1, May 2021.</p>	<p>Penelitian ini menganalisis Kawasan Indo-Pasifik serta kepentingan nasional negara-negara yang berada di Kawasan Indo-Pasifik yang kemudian mendorong dinamika pergeseran kekuatan yang</p>	<p>Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana kawasan Indo-Pasifik menjadi wilayah paling berpengaruh saat ini karena pertumbuhan ekonomi, perdagangan,</p>

		dipengaruhi oleh berbagai kebijakan keamanan, terutama negara-negara yang memiliki kemampuan dan pengaruh dalam membentuk struktur keamanan di Indo-Pasifik.	dan sumber daya lautnya. Sehingga diplomasi Angkatan Laut menjadi cara (<i>ways</i>), yang akan dioptimalkan untuk mengatasi berbagai potensi ancaman di kawasan ini.
4	Noraini Zulkifli, Muhamad Nazrul Basar, Azrul Azlan Abdul Rahman <i>The Modernisation of Indonesian Naval Forces In Jokowi Era</i> Jebat: Malaysian Journal of History, Politics & Strategic Studies, 2020.	Membahas tentang penetapan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.	Fokus pembahasan hanya dibatasi pada peran diplomasi TNI AL sebagai wujud implementasi salah satu pilar PMD.
5	Amarulla Octavian, Priyo Cahyono, Widodo Setiyo. <i>The Influence Of Indonesian Navy Diplomacy Through Naval Presence On The Effectiveness Of Maritime Operations In The North Natuna Sea. Internasional Journal Vol 11, NO. 4 (54-60). 2020.</i>	Penelitian ini sama-sama menggunakan kajian diplomasi Angkatan Laut yang merupakan salah satu peran dari trinitas angkatan laut.	Dalam penelitian terdahulu, peneliti menggunakan metode kuantitatif sedangkan dalam tesis peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif.
6	David Scott. <i>Indonesia Grapples with the Indo-Pacific: Outreach, Strategic Discourse, and Diplomacy.</i> NATO Defense College Foundation (Rome). 2019	Kedua penelitian sama-sama menggunakan dan menjelaskan mengenai konsep dan kepentingan yang dimiliki oleh berbagai negara yang ada di kawasan indo-pasifik, terutama mengenai rivalitas AS-Tiongkok.	Penelitian sebelumnya menjelaskan mengenai kerja sama strategis yang harus dilakukan oleh Indonesia di Kawasan Indo-Pasifik, sementara dalam Tesis peneliti akan berfokus pada bagaimana upaya yang dapat

			dilakukan oleh Indonesia untuk dapat memperkuat diplomasi AL di kawasan Indo-Pasifik.
7	Trio Sirmareza. <i>Naval Diplomacy</i> Dalam Pengiriman Satuan Tugas Maritim Tentara Nasional Indonesia di United Nations Interim Force In Lebanon. Jurnal Diplomasi Pertahanan Vol 3 No. 1, 2017.	Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan Diplomasi Angkatan Laut untuk mengelaborasi permasalahan yang telah ditetapkan serta dalam pengembangan teorinya.	Pada tesis peneliti berfokus pada peran Angkatan Laut secara umum yang bertujuan untuk mendukung sistem pertahanan negara.
8	Harry Riana dan Arfin Sudirman. <i>Maritime Diplomacy</i> Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia. Jurnal Wacana Politik Vol 1 No. 2 (175 – 182). 2016.	Kedua penelitian sama-sama menggunakan Trinitas AL dan berfokus pada Diplomasi Angkatan Laut.	Tesis peneliti akan berfokus pada upaya diplomasi AL Indonesia untuk mendukung stabilitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Sementara penelitian pendahulu fokus pada keamanan maritim.
9	A. Yani Antariksa, Diplomasi Pertahanan Laut Indonesia Dalam Konteks Pergeseran Geopolitik di Kawasan Pada Masa Depan – Jurnal Pertahanan, Volume 4, Nomor 2, Agustus 2014.	Penelitian ini sama-sama menganalisis konsep Diplomasi Angkatan Laut dan kompleksitas Kawasan Laut China selatan akibat adanya pergeseran geopolitik dan geostrategi serta dinamika lingkungan global.	Dalam tesis ini, peneliti akan menganalisis bagaimana upaya penguatan diplomasi Angkatan laut untuk menghadapi ancaman yang ada serta mendukung sistem pertahanan negara.

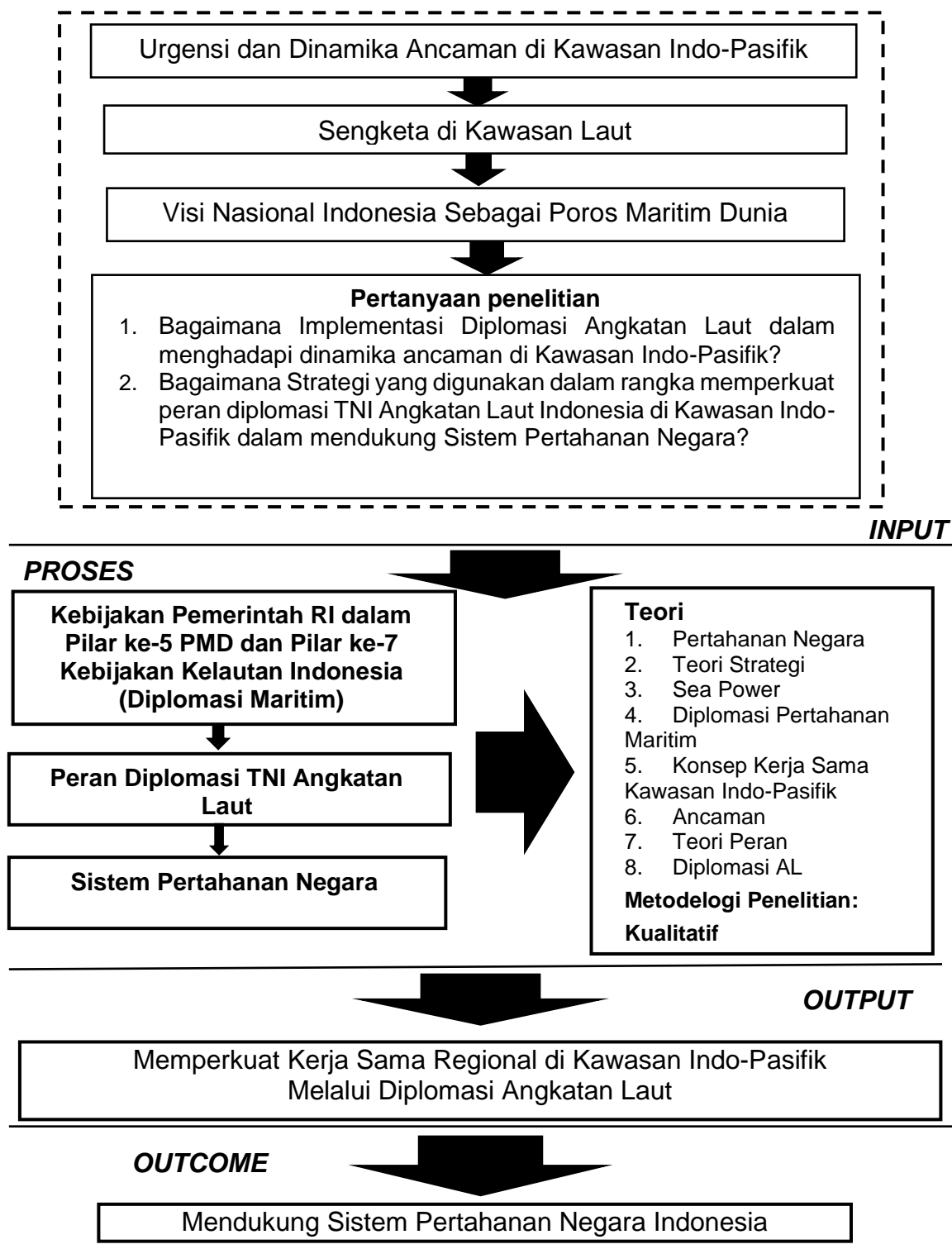
Sumber: diolah oleh Peneliti (2022)

2.3 Kerangka Pemikiran

Sugiyono (2013), menjelaskan kerangka berpikir adalah sebuah model konseptual yang dimanfaatkan sebagai teori yang ada kaitannya dengan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Sementara, menurut Sapto Haryoko kerangka berpikir berisi daftar variabel yang menjadi topik ataupun unsur tertentu yang berhubungan dengan kegiatan penelitian dan penulisan.

Sementara itu, berdasarkan pedoman tesis Universitas Pertahanan RI (2021), Kerangka berpikir merupakan narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Adapun esensi dari kerangka pemikiran yaitu mendeskripsikan alur pemikiran peneliti secara logis, atau dapat dipahami juga sebagai serangkaian penalaran dalam suatu kerangka penelitian yang dimulai dari munculnya permasalahan, berbagai aspek lain termasuk teori yang berhubungan dengan masalah, proses analisis hingga pada kesimpulan. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran terletak pada fenomena, gejala atau kasus yang selama ini dilihat atau diamati langsung oleh peneliti yang direfleksikan ke dalam bentuk bagan (Octavian A. , 2021).

Input dalam penelitian ini yaitu elaborasi dari konsep PMD, sengketa yang terjadi di kawasan laut, serta dinamika ancaman di kawasan Indo-Pasifik. Proses penelitian mencakup pendekatan teori-teori yang terkait seperti teori Mahan dalam Pertahanan Negara, Teori Strategi, *Sea Power*, Teori ancaman, Diplomasi Pertahanan Maritim, Teori Peran, serta Diplomasi AL (*Naval Diplomacy*). Selanjutnya *output* yang diharapkan adalah dapat Membangun Keamanan Regional di Kawasan Indo-Pasifik Melalui Diplomasi Angkatan Laut, dengan *outcome* yang diharapkan yaitu untuk mendukung sistem pertahanan Indonesia. Sehingga terbentuk kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran
Sumber: Diolah oleh peneliti.